

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sebelum Soeharto mengambil alih pemerintahan, Indonesia berada dalam krisis ekonomi serius di bawah Presiden Soekarno. Kebijakan ekonomi Orde Lama, seperti Sistem Ekonomi Terpimpin dan nasionalisasi aset asing, tidak mampu mengatasi masalah inflasi tinggi, defisit perdagangan, dan kekurangan pangan. Ketidakstabilan politik, termasuk peristiwa G30S/PKI pada 1965, memperburuk situasi. Soeharto, sebagai Komandan Angkatan Darat, berperan dalam memulihkan stabilitas politik dan keamanan pasca-G30S. Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966, ia diberi wewenang untuk mengendalikan keadaan negara, membuka jalan bagi transisi kekuasaan. Soeharto kemudian mulai memperkenalkan kebijakan ekonomi yang pragmatis dan berorientasi pasar untuk menstabilkan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan publik.
2. Soeharto memprioritaskan stabilitas politik dan ekonomi sebagai dasar pembangunan nasional. Dengan menerapkan kebijakan ekonomi terbuka yang berorientasi pasar. Langkah-langkah penting yang diambilnya termasuk program stabilisasi ekonomi, reformasi investasi asing, serta peluncuran Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pertama pada 1969. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan inflasi, menarik modal asing, serta memperkuat sektor pertanian, yang mencerminkan pendekatan pragmatis Soeharto dalam mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

3. Dampak Kebijakan Perekonomian Soeharto (1966-1974) pada periode ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Stabilitas politik yang dihasilkan dari kebijakan represif dan pengendalian ketat oleh militer (Dwi Fungsi ABRI) menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi. Salah satu dampak paling signifikan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi makro, swasembada pangan, dan percepatan pembangunan infrastruktur. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan ketergantungan pada modal asing dan terpusatnya kekuasaan di tangan pemerintah, yang mengakibatkan lemahnya partisipasi politik masyarakat.

5.2 Saran

1. Untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif mengenai perkembangan ekonomi Indonesia, penelitian di masa depan dapat membandingkan secara langsung kebijakan ekonomi Soekarno pada masa Orde Lama dan Soeharto pada masa Orde Baru. Penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan ekonomi di kedua era tersebut, serta memberikan evaluasi yang lebih lengkap mengenai transisi ekonomi di Indonesia.
2. Penelitian selanjutnya bisa lebih fokus pada perbandingan kebijakan ekonomi Soeharto dengan presiden lain setelahnya. Analisis ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana kebijakan ekonomi pada awal Orde Baru membentuk fondasi pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang dan dampaknya pada pemerataan kesejahteraan nasional di masa kini.

3. Saran lain untuk penelitian ke depan adalah mengevaluasi kebijakan Soeharto dari perspektif keberlanjutan lingkungan dan sosial. Penelitian ini bisa mengeksplorasi apakah pembangunan ekonomi yang pesat pada masa Orde Baru telah memperhitungkan dampak terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam di Indonesia, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada generasi berikutnya.